



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ **2** /404.101.2/B/2023

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA
ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NGAWI
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi, maka perlu menunjuk dan mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 30);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 216);
11. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/829/404.101.2/B/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2023, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas dan wewenang:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran unit kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - f. menandatangani SPM LS dan SPM TU;
 - g. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - h. melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya yang dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas dan wewenang:
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
 - c. menerima dan menyimpan TU dari Bendahara Umum Daerah;
 - d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
 - e. menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.
- KELIMA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Kode Rekening 5.1.01.03.07.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal **4 Januari 2023**

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu yang bersangkutan.

DAFTAR KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NGAWI
 TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Kedudukan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	Nama / NIP	Kode Rekening	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Honorarium per Bulan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	a. Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Tata Pemerintahan	ACHMAD ROY ROZANO, S.STP. NIP 19770607 199612 1 002	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	1,379,446,500.00	1,080,000.00
			4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	101,871,500.00	
			4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	781,835,000.00	
			4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	495,740,000.00	
			4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	539,340,500.00	
	4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	539,340,500.00			
	b. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Tata Pemerintahan	CERIANING WRAHADNALA DEWI NIP 19850526 200901 2 005	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	1,379,446,500.00	500,000.00
			4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	101,871,500.00	
			4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	781,835,000.00	
			4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	495,740,000.00	
4.01.02.2.04			Fasilitasi Kerjasama Daerah	539,340,500.00		
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	539,340,500.00				
2.	a. Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Hukum	APRIANA KUSUMANINGRUM, S.H., M.Hum. NIP 19800406 200501 2 015	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum.	1,395,072,325.00	1,080,000.00
			4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	826,800,325.00	
			4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	410,040,000.00	
			4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum Dan Pengelolaan Informasi Hukum	158,232,000.00	
	b. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Hukum	DOMNINA KIMIASTUTI, A.Md. NIP 19841012 200901 2 008	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum.	1,395,072,325.00	500,000.00
			4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	826,800,325.00	
			4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	410,040,000.00	
			4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum Dan Pengelolaan Informasi Hukum	158,232,000.00	
3.	a. Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Kesejahteraan Rakyat	Drs. SUTRISNO, M.M. NIP 19660505 199602 1 002	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	12,276,971,500.00	1,735,000.00
			4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	11,690,771,500.00	
			4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	554,200,000.00	
			4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	32,000,000.00	
			4.01.02.2.02.04	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	23,730,000.00	
			4.01.02.2.02.05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	19,045,000.00	

1	2	3	4	5	6	7
	b. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Kesejahteraan Rakyat	CHOMARI NIP 19781002 200701 1 005	4.01.02.2.02 4.01.02.2.02.01 4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	12,276,971,500.00 11,690,771,500.00 554,200,000.00	810,000.00
			4.01.02.2.02.03 4.01.02.2.02.04 4.01.02.2.02.05	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	32,000,000.00 23,730,000.00 19,045,000.00	
4.	a. Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Perekonomian	SRI WIDODO, S.P., M.MA. NIP 19650218 199203 1 003	4.01.03.2.01 4.01.03.2.01.01 4.01.03.2.01.02 4.01.03.2.01.03 4.01.03.2.01.04 4.01.03.2.04 4.01.03.2.04.01 4.01.03.2.04.02 4.01.03.2.04.03	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian; Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Perencanaan Dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi Dan Air	720,326,500.00 232,326,500.00 227,000,000.00 147,000,000.00 114,000,000.00 419,020,500.00 153,874,500.00 98,000,000.00 167,146,000.00	1,080,000.00
	b. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Perekonomian	ERLINDA RAHMANITA, S.STP. NIP 19940920 201808 2 001	4.01.03.2.01 4.01.03.2.01.01 4.01.03.2.01.02 4.01.03.2.01.03 4.01.03.2.01.04 4.01.03.2.04 4.01.03.2.04.01 4.01.03.2.04.02 4.01.03.2.04.03	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian; Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Perencanaan Dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan pembentukan BLUD Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi Dan Air	720,326,500.00 232,326,500.00 227,000,000.00 147,000,000.00 114,000,000.00 419,020,500.00 153,874,500.00 98,000,000.00 167,146,000.00	500,000.00

1	2	3	4	5	6	7			
5.	a. Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Administrasi Pembangunan	IRWAN ESTI CAHYONO, S.Hut., M.H. NIP 19740811 200003 1 003	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67,738,500.00	1,080,000.00			
			4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33,268,000.00				
			4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4,988,000.00				
			4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4,790,000.00				
			4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5,262,500.00				
			4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4,640,000.00				
			4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14,790,000.00				
			4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan.	1,350,642,000.00				
			4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program pembangunan	599,470,000.00				
			4.01.03.2.02.02	Pengendalian Dan Evaluasi Program pembangunan	488,810,000.00				
			4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	262,362,000.00				
			b. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Administrasi Pembangunan	KASMURI NIP 19670408 199803 1 006	4.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67,738,500.00	500,000.00
					4.01.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33,268,000.00	
	4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			4,988,000.00				
	4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			4,790,000.00				
	4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			5,262,500.00				
	4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			4,640,000.00				
	6.	a. Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	MAMIK SUBAGYO, S.E., M.M. NIP 19740424 200212 1 007	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.	1,853,485,500.00	1,080,000.00		
				4.01.03.2.03.01	Pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa	1,037,316,000.00			
4.01.03.2.03.02				Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	129,605,000.00				
4.01.03.2.03.03				Pembinaan Dan Advokasi pengadaan Barang Dan Jasa	686,564,500.00				
b. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		TAUFIK NIP 19850608 201001 1 003	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1,853,485,500.00	500,000.00			
			4.01.03.2.03.01	Pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa	1,037,316,000.00				
			4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	129,605,000.00				
7.	a. Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Organisasi	HARI WAHONO, S.STP., M.I.Kom. NIP 19760410 199612 1 002	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	1,333,777,500.00	1,080,000.00			
			4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	299,480,000.00				
			4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	502,480,000.00				
			4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja Dan Reformasi Birokrasi	407,998,000.00				
			4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	43,640,000.00				
			4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	80,179,500.00				

1	2	3	4	5	6	7
	b. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Organisasi	OVA RISELLA KUNCORO NIP 19860430 201001 2 001	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	1,333,777,500.00	500,000.00
			4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	299,480,000.00	
			4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	502,480,000.00	
			4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja Dan Reformasi Birokrasi	407,998,000.00	
			4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	43,640,000.00	
			4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	80,179,500.00	
8.	a. Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Umum	SUYANTO, S.H., M.M. NIP 19780206 199703 1 001	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18,548,722,816.00	2,090,000.00
			4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18,544,792,816.00	
			4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3,930,000.00	
			4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	160,000,000.00	
			4.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	160,000,000.00	
			4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,267,175,266.00	
			4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	199,116,700.00	
			4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	332,899,210.00	
			4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	193,189,200.00	
			4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	199,992,756.00	
			4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	175,000,000.00	
			4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	217,190,000.00	
			4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	949,787,400.00	
			4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,048,723,000.00	
			4.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	635,000,000.00	
			4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	104,200,000.00	
			4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	299,523,000.00	
			4.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10,000,000.00	
			4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,921,585,672.00	
			4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	2,442,385,672.00	
			4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,101,600,000.00	
			4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	377,600,000.00	
			4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,580,794,000.00	
			4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	352,000,000.00	

1	2	3	4	5	6	7
			4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	397,000,000.00	
			4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	25,000,000.00	
			4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	163,550,000.00	
			4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	643,244,000.00	
			4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2,005,509,152.00	
			4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1,405,509,152.00	
			4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600,000,000.00	
			4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	3,557,385,340.00	
			4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	2,569,873,340.00	
			4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	987,512,000.00	
	b. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Umum	YULIATI, S.E. NIP 19860616 201101 2 037	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18,548,722,816.00	980,000.00
			4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18,544,792,816.00	
			4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3,930,000.00	
			4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	160,000,000.00	
			4.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	160,000,000.00	
			4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,267,175,266.00	
			4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	199,116,700.00	
			4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	332,899,210.00	
			4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	193,189,200.00	
			4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	199,992,756.00	
			4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	175,000,000.00	
			4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	217,190,000.00	
			4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	949,787,400.00	
			4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,048,723,000.00	
			4.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	635,000,000.00	
			4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	104,200,000.00	
			4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	299,523,000.00	
			4.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10,000,000.00	
			4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,921,585,672.00	
			4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	2,442,385,672.00	

1	2	3	4	5	6	7
			4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,101,600,000.00	
			4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	377,600,000.00	
			4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,580,794,000.00	
			4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	352,000,000.00	
			4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	397,000,000.00	
			4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	25,000,000.00	
			4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	163,550,000.00	
			4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	643,244,000.00	
			4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2,005,509,152.00	
			4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1,405,509,152.00	
			4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600,000,000.00	
			4.01.01.2.12	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	3,557,385,340.00	
			4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	2,569,873,340.00	
			4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	987,512,000.00	
9.	a. Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Drs. MAHMUD ROSADI NIP 19730706 199311 1 001	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	5,012,949,500.00	1,410,000.00
			4.01.01.2.14.01	Fasilitas Keprotokolan	790,172,000.00	
			4.01.01.2.14.02	Fasilitas Komunikasi Pimpinan	3,333,253,000.00	
			4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	889,524,500.00	
	b. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	SUYONO NIP 19760517 200801 1 017	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	5,012,949,500.00	640,000.00
			4.01.01.2.14.01	Fasilitas Keprotokolan	790,172,000.00	
			4.01.01.2.14.02	Fasilitas Komunikasi Pimpinan	3,333,253,000.00	
			4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	889,524,500.00	

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO